



BUPATI MAROS

PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR: 44 TAHUN 2010

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI MAROS

- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Maros tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

MEMUTUSKAN :

Memperhatikan : Peraturan Menteri Keuangan nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011.

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAROS TENTANG STANDAR BIAYA UMUM KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan;
2. Harga satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan;
3. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan;
4. Indeks biaya masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan;
5. Indeks biaya keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan;
6. Total biaya keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.-

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Umum Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 berfungsi sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Maros dalam menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2011.
- (2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dalam rangka pelaksanaan kegiatan, standar biaya umum tahun anggaran 2011 dapat berfungsi sebagai batas biaya tertinggi atau estimasi tertinggi;

Pasal 3

Standar Biaya Umum Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2011 adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, berkewajiban menyebarluaskan, melakukan pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan peraturan ini dilingkungan kerjanya masing-masing.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka segala peraturan yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal, 20 Desember 2010

BUPATI MAROS,


H. M. HATTA RAHMAN

Diundangkan di Maros
Pada tanggal, 20 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. H. BAHARUDDIN, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19600909 198603 1 029

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2010 NOMOR 44

PARAF	
Asisten :	
Kadis :	
Sekretaris :	
Kabid :	
Kasi/Kasubag :	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR

: 44 TAHUN 2010

TANGGAL

: 20 DESEMBER 2010

TENTANG

: STANDAR BIAYA UMUM KABUPATEN
MAROS TAHUN ANGGARAN 2011.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2011	K E T
1	2	3	4	5
1	HONOR PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN/BARANG			
	1.1 BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)	Orang/Bulan	Rp 1,250,000	
	1.2 KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (KBUD)	Orang/Bulan	Rp 1,000,000	
	1.3 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/BARANG			
	a Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta sd. Rp 250 juta	Orang/Bulan	Rp 473,000	
	b Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta sd. Rp 500 juta	Orang/Bulan	Rp 539,000	
	c Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta sd. Rp 1 milyar	Orang/Bulan	Rp 599,500	
	d Nilai pagu dana diatas Rp 1 milyar sd. Rp 2.5 milyar	Orang/Bulan	Rp 665,500	
	e Nilai pagu dana diatas Rp 2.5 milyar sd. Rp 5 milyar	Orang/Bulan	Rp 726,000	
	f Nilai pagu dana diatas Rp 5 milyar sd. Rp 10 milyar	Orang/Bulan	Rp 852,500	
	g Nilai pagu dana diatas Rp 10 milyar sd. Rp 50 milyar	Orang/Bulan	Rp 1,045,000	
	h Nilai pagu dana diatas Rp 50 milyar sd. Rp 100 milyar	Orang/Bulan	Rp 1,292,500	
	1.4 PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG			
	a Nilai pagu dana sd. Rp 50 juta	Orang/Bulan	Rp 253,000	
	b Nilai pagu dana diatas Rp 50 juta sd. Rp 100 juta	Orang/Bulan	Rp 379,500	
	c Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta sd. Rp 250 juta	Orang/Bulan	Rp 440,000	
	d Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta sd. Rp 500 juta	Orang/Bulan	Rp 506,000	
	e Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta sd. Rp 1 milyar	Orang/Bulan	Rp 566,500	
	f Nilai pagu dana diatas Rp 1 milyar sd. Rp 2.5 milyar	Orang/Bulan	Rp 632,500	
	g Nilai pagu dana diatas Rp 2.5 milyar sd. Rp 5 milyar	Orang/Bulan	Rp 693,000	
	h Nilai pagu dana diatas Rp 5 milyar sd. Rp 10 milyar	Orang/Bulan	Rp 819,500	
	i Nilai pagu dana diatas Rp 10 milyar sd. Rp 50 milyar	Orang/Bulan	Rp 1,012,000	
	1.5 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN ATAU PPTK			
	a Nilai pagu dana sd. Rp 50 juta	Orang/Bulan	Rp 220,000	
	b Nilai pagu dana diatas Rp 50 juta sd. Rp 100 juta	Orang/Bulan	Rp 346,500	
	c Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta sd. Rp 250 juta	Orang/Bulan	Rp 407,000	
	d Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta sd. Rp 500 juta	Orang/Bulan	Rp 473,000	
	e Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta sd. Rp 1 milyar	Orang/Bulan	Rp 533,500	
	f Nilai pagu dana diatas Rp 1 milyar sd. Rp 2.5 milyar	Orang/Bulan	Rp 599,500	
	g Nilai pagu dana diatas Rp 2.5 milyar sd. Rp 5 milyar	Orang/Bulan	Rp 660,000	
	h Nilai pagu dana diatas Rp 5 milyar sd. Rp 10 milyar	Orang/Bulan	Rp 786,500	
	i Nilai pagu dana diatas Rp 10 milyar sd. Rp 50 milyar	Orang/Bulan	Rp 979,000	
	1.6 PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SPM DAN ATAU PPK			
	a Nilai pagu dana sd. Rp 50 juta	Orang/Bulan	Rp 200,000	
	b Nilai pagu dana diatas Rp 50 juta sd. Rp 100 juta	Orang/Bulan	Rp 290,000	
	c Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta sd. Rp 250 juta	Orang/Bulan	Rp 345,000	
	d Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta sd. Rp 500 juta	Orang/Bulan	Rp 400,000	
	e Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta sd. Rp 1 milyar	Orang/Bulan	Rp 460,000	
	f Nilai pagu dana diatas Rp 1 milyar sd. Rp 2.5 milyar	Orang/Bulan	Rp 515,000	
	g Nilai pagu dana diatas Rp 2.5 milyar sd. Rp 5 milyar	Orang/Bulan	Rp 875,000	
	h Nilai pagu dana diatas Rp 5 milyar sd. Rp 10 milyar	Orang/Bulan	Rp 690,000	
	i Nilai pagu dana diatas Rp 10 milyar sd. Rp 50 milyar	Orang/Bulan	Rp 800,000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2011	K E T
1	2	3	4	5
	1.7 BENDAHARA PENGELUARAN SKPKD			
	a Nilai pagu dana sd. Rp 50 juta	Orang/Bulan	Rp 175,000	
	b Nilai pagu dana diatas Rp 50 juta sd. Rp 100 juta	Orang/Bulan	Rp 260,000	
	c Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta sd. Rp 250 juta	Orang/Bulan	Rp 320,000	
	d Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta sd. Rp 500 juta	Orang/Bulan	Rp 345,000	
	e Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta sd. Rp 1 milyar	Orang/Bulan	Rp 400,000	
	f Nilai pagu dana diatas Rp 1 milyar sd. Rp 2.5 milyar	Orang/Bulan	Rp 460,000	
	g Nilai pagu dana diatas Rp 2.5 milyar sd. Rp 5 milyar	Orang/Bulan	Rp 490,000	
	h Nilai pagu dana diatas Rp 5 milyar sd. Rp 10 milyar	Orang/Bulan	Rp 575,000	
	i Nilai pagu dana diatas Rp 10 milyar sd. Rp 50 milyar	Orang/Bulan	Rp 800,000	
	1.8 BENDAHARA PENGELUARAN SKPD			
	a Nilai pagu dana sd. Rp 50 juta	Orang/Bulan	Rp 175,000	
	b Nilai pagu dana diatas Rp 50 juta sd. Rp 100 juta	Orang/Bulan	Rp 260,000	
	c Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta sd. Rp 250 juta	Orang/Bulan	Rp 320,000	
	d Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta sd. Rp 500 juta	Orang/Bulan	Rp 345,000	
	e Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta sd. Rp 1 milyar	Orang/Bulan	Rp 400,000	
	f Nilai pagu dana diatas Rp 1 milyar sd. Rp 2.5 milyar	Orang/Bulan	Rp 460,000	
	g Nilai pagu dana diatas Rp 2.5 milyar sd. Rp 5 milyar	Orang/Bulan	Rp 490,000	
	h Nilai pagu dana diatas Rp 5 milyar sd. Rp 10 milyar	Orang/Bulan	Rp 575,000	
	i Nilai pagu dana diatas Rp 10 milyar sd. Rp 50 milyar	Orang/Bulan	Rp 800,000	
	j Nilai pagu dana diatas Rp 50 milyar sd. Rp 100 milyar	Orang/Bulan	Rp 860,000	
	1.9 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU			
	a Nilai pagu dana sd. Rp 50 juta	Orang/Bulan	Rp 165,000	
	b Nilai pagu dana diatas Rp 50 juta sd. Rp 100 juta	Orang/Bulan	Rp 240,000	
	c Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta sd. Rp 250 juta	Orang/Bulan	Rp 290,000	
	d Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta sd. Rp 500 juta	Orang/Bulan	Rp 325,000	
	e Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta sd. Rp 1 milyar	Orang/Bulan	Rp 365,000	
	f Nilai pagu dana diatas Rp 1 milyar sd. Rp 2.5 milyar	Orang/Bulan	Rp 400,000	
	g Nilai pagu dana diatas Rp 2.5 milyar sd. Rp 5 milyar	Orang/Bulan	Rp 460,000	
	h Nilai pagu dana diatas Rp 5 milyar sd. Rp 10 milyar	Orang/Bulan	Rp 550,000	
	i Nilai pagu dana diatas Rp 10 milyar sd. Rp 50 milyar	Orang/Bulan	Rp 690,000	
	j Nilai pagu dana diatas Rp 50 milyar sd. Rp 100 milyar	Orang/Bulan	Rp 800,000	
	1.10 STAF PENGELOLA			
	a Nilai pagu dana sd. Rp 50 juta	Orang/paket	Rp 125,000	
	b Nilai pagu dana diatas Rp 50 juta sd. 100 juta	Orang/paket	Rp 185,000	
	c Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta sd. Rp 250 juta	Orang/paket	Rp 215,000	
	d Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta sd. Rp 500 juta	Orang/paket	Rp 240,000	
	e Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta sd. Rp 1 milyar	Orang/paket	Rp 270,000	
	f Nilai pagu dana diatas Rp 1 milyar sd. Rp 2.5 milyar	Orang/paket	Rp 300,000	
	g Nilai pagu dana diatas Rp 2.5 milyar sd. Rp 5 milyar	Orang/paket	Rp 330,000	
	h Nilai pagu dana diatas Rp 5 milyar sd. Rp 10 milyar	Orang/paket	Rp 385,000	
	i Nilai pagu dana diatas Rp 10 milyar sd. Rp 50 milyar	Orang/paket	Rp 470,000	
	j Nilai pagu dana diatas Rp 50 milyar sd. Rp 100 milyar	Orang/paket	Rp 583,000	
2	HONOR PENGELOLA PNBPN			
	2.1 ATASAN LANGSUNG BENDAHARA PENERIMA			
	a Nilai Penerimaan per tahun sd. Rp 200 juta	Orang/Bulan	Rp 515,000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2011	K E T
1	2	3	4	5
	b Nilai Penerimaan per tahun di atas Rp 200 juta sd. Rp 500 juta	Orang/Bulan	Rp 630,000	
	c Nilai Penerimaan per tahun di atas Rp 500 juta sd. Rp 1 miliar	Orang/Bulan	Rp 690,000	
	d Nilai Penerimaan per tahun di atas Rp 1 miliar sd. Rp 5 miliar	Orang/Bulan	Rp 800,000	
	e Nilai Penerimaan per tahun di atas Rp 5 miliar	Orang/Bulan	Rp 920,000	
	2.2 BENDAHARA PENERIMA			
	a Nilai Penerimaan per tahun sd. Rp 200 juta	Orang/Bulan	Rp 345,000	
	b Nilai Penerimaan per tahun di atas Rp 200 juta sd. Rp 500 juta	Orang/Bulan	Rp 460,000	
	c Nilai Penerimaan per tahun di atas Rp 500 juta sd. Rp 1 miliar	Orang/Bulan	Rp 575,000	
	d Nilai Penerimaan per tahun di atas Rp 1 miliar sd. Rp 5 miliar	Orang/Bulan	Rp 690,000	
	e Nilai Penerimaan per tahun di atas Rp 5 miliar	Orang/Bulan	Rp 800,000	
	2.3 BENDAHARA PENERIMA PEMBANTU			
	a Nilai Penerimaan per tahun sd. Rp 200 juta	Orang/Bulan	Rp 240,000	
	b Nilai Penerimaan per tahun di atas Rp 200 juta sd. Rp 500 juta	Orang/Bulan	Rp 360,000	
	c Nilai Penerimaan per tahun di atas Rp 500 juta sd. Rp 1 miliar	Orang/Bulan	Rp 480,000	
	d Nilai Penerimaan per tahun di atas Rp 1 miliar sd. Rp 5 miliar	Orang/Bulan	Rp 600,000	
	e Nilai Penerimaan per tahun di atas Rp 5 miliar	Orang/Bulan	Rp 720,000	
	2.4 STAF PENGELOLA			
	Anggota/staf pengelola, maksimum 5 orang	Orang/Bulan	Rp 220,000	
3	HONOR PEJABAT / PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA			
	3.1 PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA			
		Orang/paket	Rp 200,000	
	3.2 PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA (KONSTRUKSI)			
	a Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp 50 juta	Orang/paket	Rp 200,000	
	b Nilai pagu pengadaan diatas Rp 50 juta sd. Rp 100 juta	Orang/paket	Rp 365,000	
	c Nilai pagu pengadaan diatas Rp 100 juta sd. Rp 250 juta	Orang/paket	Rp 545,000	
	d Nilai pagu pengadaan diatas Rp 250 juta sd. Rp 500 juta	Orang/paket	Rp 640,000	
	e Nilai pagu pengadaan diatas Rp 500 juta sd. Rp 1 milyar	Orang/paket	Rp 725,000	
	f Nilai pagu pengadaan diatas Rp 1 milyar sd. Rp 2.5 milyar	Orang/paket	Rp 820,000	
	g Nilai pagu pengadaan diatas Rp 2.5 milyar sd. Rp 5 milyar	Orang/paket	Rp 910,000	
	h Nilai pagu pengadaan diatas Rp 5 milyar sd. Rp 10 milyar	Orang/paket	Rp 1,000,000	
	i Nilai pagu pengadaan diatas Rp 10 milyar sd. Rp 50 milyar	Orang/paket	Rp 1,165,000	
	3.3 PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI)			
	a Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp 50 juta	Orang/paket	Rp 200,000	
	b Nilai pagu pengadaan diatas Rp 50 juta sd. Rp 100 juta	Orang/paket	Rp 275,000	
	c Nilai pagu pengadaan diatas Rp 100 juta sd. Rp 250 juta	Orang/paket	Rp 340,000	
	d Nilai pagu pengadaan diatas Rp 250 juta sd. Rp 500 juta	Orang/paket	Rp 475,000	
	e Nilai pagu pengadaan diatas Rp 500 juta sd. Rp 1 milyar	Orang/paket	Rp 545,000	
	f Nilai pagu pengadaan diatas Rp 1 milyar sd. Rp 2.5 milyar	Orang/paket	Rp 605,000	
	g Nilai pagu pengadaan diatas Rp 2.5 milyar sd. Rp 5 milyar	Orang/paket	Rp 665,000	
	h Nilai pagu pengadaan diatas Rp 5 milyar sd. Rp 10 milyar	Orang/paket	Rp 750,000	
	i Nilai pagu pengadaan diatas Rp 10 milyar sd. Rp 50 milyar	Orang/paket	Rp 880,000	
	3.4 PANITIA PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI)			
	a Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp 50 juta	Orang/paket	Rp 200,000	
	b Nilai pagu pengadaan diatas Rp 50 juta sd. Rp 100 juta	Orang/paket	Rp 240,000	
	c Nilai pagu pengadaan diatas Rp 100 juta sd. Rp 250 juta	Orang/paket	Rp 340,000	
	d Nilai pagu pengadaan diatas Rp 250 juta sd. Rp 500 juta	Orang/paket	Rp 475,000	
	e Nilai pagu pengadaan diatas Rp 500 juta sd. Rp 1 milyar	Orang/paket	Rp 545,000	
	f Nilai pagu pengadaan diatas Rp 1 milyar sd. Rp 2.5 milyar	Orang/paket	Rp 605,000	
	g Nilai pagu pengadaan diatas Rp 2.5 milyar sd. Rp 5 milyar	Orang/paket	Rp 665,000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2011	K E T
1	2	3	4	5
4	HONOR PANITIA PEMERIKSA / PENERIMA BARANG/JASA			
	a Pengadaan barang Rp 50 juta sd. Rp 500 juta atau jasa konsultan Rp 50 juta sd. Rp 200 juta	Orang/Paket	Rp 250,000	
	b Pengadaan barang diatas Rp 500 juta atau jasa konsultan diatas Rp 200 juta	Orang/Paket	Rp 370,000	
5	HONOR PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG			
	a Pengurus barang	Orang/Bulan	Rp 500,000	
	b Penyimpan barang	Orang/Bulan	Rp 500,000	
6	HONOR PENGELOLA SISTEM SKPD			
	6.1 Unit pengelola sistem SKPD yang ditetapkan dgn Keputusan Bupati			
	a Pengarah	Orang/Bulan	Rp 350,000	
	b Penanggung jawab	Orang/Bulan	Rp 300,000	
	c Koordinator	Orang/Bulan	Rp 250,000	
	d Ketua/Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp 200,000	
	e Anggota	Orang/Bulan	Rp 150,000	
	6.2 Unit pengelola sistem SKPD yang ditetapkan dgn Keputusan Sekretaris Kabupaten			
	a Penanggung jawab	Orang/Bulan	Rp 300,000	
	b Koordinator	Orang/Bulan	Rp 250,000	
	c Ketua/Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp 200,000	
	d Anggota	Orang/Bulan	Rp 150,000	
	6.3 Unit pengelola sistem SKPD yang ditetapkan dgn Keputusan Kepala SKPD			
	a Penanggung jawab	Orang/Bulan	Rp 300,000	
	b Koordinator	Orang/Bulan	Rp 250,000	
	c Ketua/Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp 200,000	
	d Anggota	Orang/Bulan	Rp 150,000	
7	HONOR NARA SUMBER DALAM RANGKA SEMINAR/RAKOR/ SOSIALISASI/DESIMILASI UNTUK KEGIATAN			
	7.1 Narasumber / Pembahas :			
	a Bupati / Pejabat Setingkat	Orang/jam	Rp 1,150,000	
	b Pejabat Eselon II / Pejabat Setingkat	Orang/jam	Rp 850,000	
	c Pejabat Eselon III / Pejabat Setingkat	Orang/jam	Rp 700,000	
	d Pejabat Eselon IV ke bawah	Orang/jam	Rp 575,000	
	7.2 Moderator	Orang/jam	Rp 300,000	
	7.3 Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus	Orang/jam	Rp 1,150,000	
8	HONOR PENGEMUDI, PRAMUBAKTI, SATPAM, CLEANING SERVICE	Orang/Bulan	Rp 1,000,000	
9	HONOR AJUDAN	Orang/Bulan	Rp 900,000	
10	HONOR PROTOKOL	Orang/Bulan	Rp 800,000	
11	HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN			
	11 Yang ditetapkan atas dasar Keputusan Bupati			
	1 Pengarah	Orang/Bulan	Rp 1,250,000	
	2 Penanggung Jawab	Orang/Bulan	Rp 1,000,000	
	3 Koordinator/Ketua	Orang/Bulan	Rp 850,000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2011	K E T
1	2	3	4	5
	4 Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp 750,000	
	5 Sekretaris	Orang/Bulan	Rp 650,000	
	6 Anggota	Orang/Bulan	Rp 650,000	
	11 Yang ditetapkan atas dasar Keputusan Sekretaris Kabupaten			
	1 Pengarah	Orang/Bulan	Rp 750,000	
	2 Penanggung Jawab	Orang/Bulan	Rp 700,000	
	3 Koordinator/Ketua	Orang/Bulan	Rp 650,000	
	4 Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp 600,000	
	5 Sekretaris	Orang/Bulan	Rp 500,000	
	6 Anggota	Orang/Bulan	Rp 500,000	
	11 Yang ditetapkan atas dasar Keputusan Kepala SKPD			
	1 Pengarah	Orang/Bulan	Rp 500,000	
	2 Penanggung Jawab	Orang/Bulan	Rp 450,000	
	3 Koordinator/Ketua	Orang/Bulan	Rp 400,000	
	4 Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp 350,000	
	5 Sekretaris	Orang/Bulan	Rp 300,000	
	6 Anggota	Orang/Bulan	Rp 300,000	
12	HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIAT			
	a Penanggung Jawab / Pembina	Orang/Bulan	Rp 350,000	
	b Ketua / Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp 300,000	
	c Sekertaris	Orang/Bulan	Rp 250,000	
	d Anggota	Orang/Bulan	Rp 250,000	
13	HONOR PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA GAJI			
	13 ATASAN LANGSUNG PENGELOLA GAJI			
	a Nilai pagu dana s.d Rp 25 miliar	Orang/Bulan	Rp 225,000	
	13 BENDAHARA PENGELOLA GAJI			
	a Nilai pagu dana s.d Rp 25 miliar	Orang/Bulan	Rp 180,000	
	13 JURU BAYAR / STAF			
	a Nilai pagu dana s.d Rp 25 miliar	Orang/Bulan	Rp 150,000	
14	VAKASI PENYELENGGARA UJIAN			
	14 Setingkat Pendidikan Dasar			
	a Penyusunan/ Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp 100,000	
	b Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp 1,350	
	c Pengawas Ujian	Orang/ Hari	Rp 175,000	
	14 Setingkat Pendidikan Menengah			
	a Penyusunan/ Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp 125,000	
	b Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp 1,350	
	c Pengawas Ujian	Orang/ Hari	Rp 200,000	
15	SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	Orang/ Hari	Rp 20,000	
16	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR			
	16 UANG LEMBUR			
	a Pegawai non PNS	Orang/ Jam	Rp 5,000	
	b Golongan I	Orang/ Jam	Rp 7,000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2011	K E T
1	2	3	4	5
	c Golongan II	Orang/ Jam	Rp 9,000	
	d Golongan III	Orang/ Jam	Rp 11,000	
	e Golongan IV	Orang/ Jam	Rp 13,000	
	16 UANG MAKAN LEMBUR	Orang	Rp 20,000	
17	SATUAN BIAYA UANG TRANSPORT KEGIATAN DALAM KOTA MAROS	Orang/ Hari	Rp 110,000	
18	SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN			
	a SKPD yang memiliki pegawai sampai dengan 40 pegawai	Paket / Tahun	Rp 35,000,000	
	b SKPD yang memiliki pegawai lebih dari 40 pegawai	Orang / Tahun	Rp 850,000	
19	SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/ STRUKTURAL			
	a Diklat Pimpinan Tk. II	Peserta/ Angk.	Rp 25,000,000	
	b Diklat Pimpinan Tk. III	Peserta/ Angk.	Rp 20,000,000	
	c Diklat Pimpinan Tk. IV	Peserta/ Angk.	Rp 15,000,000	
20	SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN			
	a Golongan I	Peserta/ Angk.	Rp 2,000,000	
	b Golongan II	Peserta/ Angk.	Rp 3,500,000	
	c Golongan III	Peserta/ Angk.	Rp 5,000,000	
21	SATUAN BIAYA DIKLAT TEKNIS / FUNGSIONAL PNS	Peserta/ Angk.	Rp 3,000,000	
22	SATUAN BIAYA DIKLAT UNTUK MASYARAKAT (non institusional)	Peserta/ Angk.	Rp 2,000,000	
23	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT			
	23 RAPAT KOORDINASI			
	a Makan	Orang/ Kali	Rp 35,000	
	b Snack	Orang/ Kali	Rp 15,000	
	23 RAPAT BIASA			
	a Makan	Orang/ Kali	Rp 20,000	
	b Snack	Orang/ Kali	Rp 10,000	
24	SATUAN BIAYA PENGADAAN MAKANAN PASIEN	Orang/ Hari	Rp 19,000	
25	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG			
	a Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Kantor Bertingkat	M2/ Tahun	Rp 115,000	
	b Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Kantor Tidak Bertingkat	M2/ Tahun	Rp 80,000	
	c Pemeliharaan Halaman Gedung/ Bangunan Kantor	M2/ Tahun	Rp 10,000	
26	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/ BANGUNAN UNTUK PERWAKILAN/WISMA/MESS PEMDA			
	a Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Perwakilan	M2/ Tahun	Rp 125,000	
	b Pemeliharaan Gedung/Bangunan Wisma/Mess Pemda	M2/ Tahun	Rp 125,000	
	c Pemeliharaan Halaman	M2/ Tahun	Rp 10,000	
27	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL SARANA KANTOR			
	27.1 Kendaraan Bermotor			
	a Kendaraan perorangan dinas	Unit/ Tahun	Rp 23,000,000	
	b Kendaraan dinas operasional	Unit/ Tahun	Rp 19,500,000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2011	K E T
1	2	3	4	5
	c Kendaraan dinas operasional khusus	Unit/ Tahun	Rp 19,200,000	
	d Kendaraan dinas operasional khusus (alat berat)	Unit/ Tahun	Rp 20,000,000	
	e Kendaraan Roda 2	Unit/ Tahun	Rp 3,000,000	
	27 Speedboat	Unit/ Tahun	Rp 12,600,000	
	27 Inventaris Kantor	Pegawai/ Tahun	Rp 45,000	
	27 Personal Komputer/ Laptop dan Printer	Unit/ Tahun	Rp 350,000	
	28 AC Split	Unit/ Tahun	Rp 300,000	
28	SATUAN BIAYA PAKAIAN			
	a Pakaian Dinas/Kerja Resmi Pegawai	Orang/ Stel	Rp 340,000	
	b Pakaian Dinas/Kerja Dokter/Perawat	Orang/ Stel	Rp 250,000	
	c Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh	Orang/ Stel	Rp 235,000	
	d Pakaian Kerja Satpam	Orang/ Stel	Rp 400,000	
29	SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN			
	29 Pejabat Eselon II	Unit	Rp 350,000,000	
	29 Kendaraan dinas operasional dan operasional khusus/lapangan			
	a Bus Roda 6	Unit	Rp 845,000,000	
	b Roda 6/ Tiga per empat	Unit	Rp 475,000,000	
	c Roda 4/ Minibus	Unit	Rp 300,000,000	
	d Kendaraan Operasional Lapangan (Doubel Gardan)	Unit	Rp 400,000,000	
	e Kendaraan doubel cabin	Unit	Rp 400,000,000	
	f Pick Up	Unit	Rp 200,000,000	
	g Roda 2	Unit	Rp 20,000,000	
30	SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN			
	a Sewa Kendaraan Roda 4	Unit/ Hari	Rp 520,000	
	b Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 20-30 Orang	Unit/ Hari	Rp 1,700,000	
	c Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 32-48 Orang	Unit/ Hari	Rp 2,550,000	
31	SATUAN BIAYA SEWA RUANG RAPAT / PERTEMUAN			
	a Ruang Besar (Kapasitas 101 - 299 Orang, terdapat di hotel)	Hari	Rp 3,500,000	
	b Ruang Sedang (Kapasitas 51 - 100 Orang, terdapat di hotel)	Hari	Rp 2,000,000	
	c Ruang Kecil (Kapasitas sampai 50 Orang, terdapat di hotel)	Hari	Rp 1,000,000	
	d Gedung Pertemuan (Kapasitas diatas 300 Orang)	Hari	Rp 5,000,000	

NO.	PROPINSI	UANG HARIAN	KETERANGAN
1	2	3	7
1	NANGROE ACEH DARUSSALAM	Rp 300,000	
2	SUMATERA UTARA	Rp 300,000	
3	RIAU	Rp 300,000	
4	KEPULAUAN RIAU	Rp 300,000	
5	JAMBI	Rp 300,000	
6	SUMATERA BARAT	Rp 300,000	
7	SUMATERA SELATAN	Rp 300,000	
8	LAMPUNG	Rp 300,000	
9	BENGKULU	Rp 300,000	
10	BANGKA BELITUNG	Rp 300,000	
11	BANTEN	Rp 300,000	
12	JAWA BARAT	Rp 350,000	
13	D.K.I JAKARTA	Rp 450,000	
14	JAWA TENGAH	Rp 300,000	
15	D.I. YOGYAKARTA	Rp 350,000	
16	JAWA TIMUR	Rp 350,000	
17	BALI	Rp 400,000	
18	NUSA TENGGARA BARAT	Rp 350,000	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Rp 350,000	
20	KALIMANTAN BARAT	Rp 300,000	
21	KALIMANTAN TENGAH	Rp 300,000	
22	KALIMANTAN SELATAN	Rp 300,000	
23	KALIMANTAN TIMUR	Rp 350,000	
24	SULAWESI UTARA	Rp 300,000	
25	GORONGTALO	Rp 300,000	
26	SULAWESI BARAT	Rp 300,000	
27	SULAWESI SELATAN	Rp 350,000	
28	SULAWESI TENGAH	Rp 300,000	
29	SULAWESI TENGGARA	Rp 300,000	
30	MALUKU	Rp 300,000	
31	MALUKU UTARA	Rp 300,000	
32	PAPUA	Rp 450,000	
33	IRIAN JAYA BARAT	Rp 400,000	

NO.	PROPINSI	TARIF RATA-RATA HOTEL KELAS STANDAR/DELUXE/NON SUITE				KET
		BINTANG EMPAT	BINTANG TIGA	BINTANG DUA	BINTANG SATU	
1	2	5	6	7	8	9
1	NANGROE ACEH DARUSSALAM	Rp 1,150,000	Rp 850,000	Rp 410,000	Rp 250,000	
2	SUMATERA UTARA	Rp 1,000,000	Rp 550,000	Rp 400,000	Rp 290,000	
3	RIAU	Rp 960,000	Rp 670,000	Rp 400,000	Rp 340,000	
4	KEPULAUAN RIAU	Rp 740,000	Rp 550,000	Rp 380,000	Rp 250,000	
5	JAMBI	Rp 1,000,000	Rp 560,000	Rp 370,000	Rp 230,000	
6	SUMATERA BARAT	Rp 1,030,000	Rp 600,000	Rp 370,000	Rp 280,000	
7	SUMATERA SELATAN	Rp 1,000,000	Rp 500,000	Rp 400,000	Rp 280,000	
8	LAMPUNG	Rp 800,000	Rp 600,000	Rp 340,000	Rp 260,000	
9	BENGGULU	Rp 790,000	Rp 580,000	Rp 490,000	Rp 400,000	
10	BANGKA BELITUNG	Rp 820,000	Rp 500,000	Rp 340,000	Rp 300,000	
11	BANTEN	Rp 1,200,000	Rp 700,000	Rp 450,000	Rp 290,000	
12	JAWA BARAT	Rp 1,200,000	Rp 830,000	Rp 440,000	Rp 330,000	
13	D.K.I JAKARTA	Rp 1,000,000	Rp 650,000	Rp 500,000	Rp 400,000	
14	JAWA TENGAH	Rp 1,100,000	Rp 750,000	Rp 450,000	Rp 280,000	
15	D.I. YOGYAKARTA	Rp 1,000,000	Rp 550,000	Rp 480,000	Rp 280,000	
16	JAWA TIMUR	Rp 960,000	Rp 600,000	Rp 390,000	Rp 280,000	
17	BALI	Rp 1,450,000	Rp 1,100,000	Rp 800,000	Rp 500,000	
18	NUSA TENGGARA BARAT	Rp 1,000,000	Rp 550,000	Rp 450,000	Rp 300,000	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Rp 1,000,000	Rp 550,000	Rp 470,000	Rp 400,000	
20	KALIMANTAN BARAT	Rp 830,000	Rp 740,000	Rp 430,000	Rp 300,000	
21	KALIMANTAN TENGAH	Rp 1,000,000	Rp 750,000	Rp 400,000	Rp 290,000	
22	KALIMANTAN SELATAN	Rp 1,200,000	Rp 700,000	Rp 500,000	Rp 350,000	
23	KALIMANTAN TIMUR	Rp 1,230,000	Rp 750,000	Rp 550,000	Rp 450,000	
24	SULAWESI UTARA	Rp 1,240,000	Rp 600,000	Rp 500,000	Rp 290,000	
25	GORONGTALO	Rp 820,000	Rp 660,000	Rp 410,000	Rp 240,000	
26	SULAWESI BARAT	Rp 670,000	Rp 540,000	Rp 400,000	Rp 360,000	
27	SULAWESI SELATAN	Rp 900,000	Rp 800,000	Rp 420,000	Rp 330,000	
28	SULAWESI TENGAH	Rp 1,010,000	Rp 510,000	Rp 400,000	Rp 330,000	
29	SULAWESI TENGGARA	Rp 900,000	Rp 600,000	Rp 450,000	Rp 350,000	
30	MALUKU	Rp 1,020,000	Rp 600,000	Rp 390,000	Rp 280,000	
31	MALUKU UTARA	Rp 1,300,000	Rp 600,000	Rp 360,000	Rp 330,000	
32	PAPUA	Rp 1,050,000	Rp 610,000	Rp 460,000	Rp 380,000	
33	IRIAN JAYA BARAT	Rp 1,050,000	Rp 900,000	Rp 400,000	Rp 370,000	

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET		KET
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI	
1	2	3	5	6	11
1	MAKASSAR	JAKARTA	Rp 6,000,000	Rp 3,000,000	
2	MAKASSAR	AMBON	Rp 4,222,500	Rp 2,422,500	
3	MAKASSAR	BALIKPAPAN	Rp 8,880,000	Rp 4,312,500	
4	MAKASSAR	BANDA ACEH	Rp 8,947,500	Rp 4,755,000	
5	MAKASSAR	BANDAR LAMPUNG	Rp 5,722,500	Rp 2,917,500	
6	MAKASSAR	BATAM	Rp 7,275,000	Rp 3,742,500	
7	MAKASSAR	DENPASAR	Rp 2,932,500	Rp 1,845,000	
8	MAKASSAR	JAMBI	Rp 6,772,500	Rp 3,472,500	
9	MAKASSAR	BIAK	Rp 5,955,000	Rp 3,457,500	
10	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp 7,147,500	Rp 4,057,500	
11	MAKASSAR	JOGJAKARTA	Rp 4,575,000	Rp 2,730,000	
12	MAKASSAR	KENDARI	Rp 1,867,500	Rp 1,252,500	
13	MAKASSAR	KUPANG	Rp 5,355,000	Rp 3,022,500	
14	MAKASSAR	MANADO	Rp 3,735,000	Rp 2,040,000	
15	MAKASSAR	TIMIKA	Rp 8,220,000	Rp 4,605,000	
16	MAKASSAR	MALANG	Rp 7,102,500	Rp 3,622,500	
17	MAKASSAR	MATARAM	Rp 3,307,500	Rp 2,040,000	
18	MAKASSAR	MEDAN	Rp 8,775,000	Rp 4,327,500	
19	MAKASSAR	PADANG	Rp 7,695,000	Rp 3,787,500	
20	MAKASSAR	PALEMBANG	Rp 6,637,500	Rp 3,352,500	
21	MAKASSAR	PALU	Rp 2,992,500	Rp 1,807,500	
22	MAKASSAR	PANGKAL PINANG	Rp 6,352,500	Rp 3,270,000	
23	MAKASSAR	PONTIANAK	Rp 6,952,500	Rp 3,675,000	
24	MAKASSAR	SEMARANG	Rp 6,637,500	Rp 3,300,000	
25	MAKASSAR	SOLO	Rp 6,637,500	Rp 3,397,500	
26	MAKASSAR	SURABAYA	Rp 4,162,500	Rp 2,407,500	

PENJELASAN

LAMPIRAN STANDAR BIAYA UMUM KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2011

1. HONOR PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN/BARANG

Pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberi honorarium berdasarkan besaran pagu yang dikelola, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dalam hal terdapat kegiatan lokasinya berjauhan dengan tempat kedudukan tempat bendahara pengeluaran dan atau beban kerja bendahara pengeluaran sangat berat, Bupati atau pejabat yang diberi kuasa dapat mengangkat satu atau lebih bendahara pengeluaran pembantu guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- b. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun paling banyak 10% dari pagu yang dikelolanya;
- c. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), jumlah staf pengelola keuangan paling banyak 6 (enam) orang termasuk Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP);
- d. KPA yang dibantu oleh satu atau beberapa PPK/PPTK, jumlah staf pengelola keuangan paling banyak 3 (tiga) orang termasuk Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP). Jumlah staf pengelola keuangan untuk setiap P2K paling banyak 2 (dua) orang.-

2. HONOR PENGELOLA PNBP

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk mengelola penerimaan negara bukan pajak. Jumlah staf/anggota pengelola PNBP paling banyak 5 (lima) orang. Jumlah alokasi dana untuk honorarium pengelola PNBP dalam 1 (satu) tahun paling banyak 10% dari penerimaan PNBP masing-masing satker.-

3. HONOR PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA

- a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh pengguna / kuasa pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sampai dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- b. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh pengguna/kuasa pengguna barang/jasa menjadi panitia pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. Anggota panitia pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.

4. HONOR PANITIA PEMERIKSA / PENERIMA BARANG / JASA

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk menerima/memeriksa barang/jasa, yang diserahkan setelah seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Honorarium diberikan per paket pekerjaan.

5. HONOR PANITIA PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk mengurus dan menyimpan barang, yang diurus serta disimpan setelah seluruh barang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Honorarium diberikan per bulan.

6. HONOR PENGELOLA SISTEM SKPD

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk mengelola kegiatan pelaksanaan sistem di setiap SKPD. Jumlah staf kegiatan paling banyak 5 (lima) orang.

7. HONOR NARA SUMBER DALAM RANGKA SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / DESIMINASI

Honorarium dapat diberikan kepada pejabat negara, pegawai negeri, pimpinan dewan serta anggota dewan, pakar/praktisi/pembicara khusus, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam unit satuan kerja peyelenggara, sepanjang pelaksanaan kegiatannya melibatkan peserta dari unit satuan kerja lainnya.

8. HONOR PENGEMUDI, PRAMUBAKTI, SATPAM DAN CLEANING SERVICE

Satuan biaya honorarium pengemudi, pramubakti, satpam dan cleaning service diperuntukkan bagi non pegawai yang diberi untuk melaksanakan kegiatan sesuai tupoksinya, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang / kontrak kerja. Untuk pengemudi, pramubakti, satpam dan cleaning service melalui jasa pihak ketiga/diborongkan, dapat ditambah paling banyak 15% (lima belas persen) dari satuan biaya.

9. HONOR AJUDAN

Honor ajudan diberikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pengawalan (ajudan).

10. HONOR PROTOKOL

Honor protokol diberikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan keprotokoleran.

11. HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN

Honorarium tim pelaksana kegiatan dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan keputusan Bupati/Sekretaris Kabupaten/Kepala SKPD.

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :

- Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- Bersifat koordinatif dengan mengikutsertakan satker/organisasi lain;
- Bersifat temporer sehingga pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau di luar jam kerja;
- Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pegawai negeri di samping tugas pokoknya sehari-hari;
- Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.-

12. HONOR TIM PELAKSANAAN LAPANGAN / TIM SEKRETARIAT

Honorarium diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim perumusan kebijakan dan strategi / pelaksana kegiatan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

13. HONOR PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA GAJI

Honorarium penanggung jawab pengelola gaji dapat diberikan kepada pegawai negeri yang ditunjuk hanya untuk melakukan pengelolaan gaji dilingkungan SKPD berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

14. VAKASI PENYELENGGARA UJIAN

Vakasi / honorarium penyelenggara ujian pada tingkat pendidikan dasar dan menengah tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal. Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transport. Vakasi penyelenggaraan ujian pada tingkat pendidikan tinggi diberikan untuk ujian semester dan ujian akhir.

15. SATUAN BIAYA UANG MAKAN PNS

Uang makan diberikan kepada PNS dan CPNS yang dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja, paling banyak 22 (dua puluh dua) hari dalam 1 (satu) bulan.

16. SATUAN BIAYA LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

Uang lembur merupakan kompensasi bagi PNS dan non PNS yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang;

Kerja lembur adalah bekerja diluar jam kerja / waktu kerja normal yang telah ditetapkan oleh masing – masing instansi / kantor pemerintah;

Pemberian uang lembur dan uang makan lembur harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua pegawai dengan besaran yang sama, dapat diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 jam berturut-turut paling banyak 1 kali sehari;
- b. Batasan waktu kerja lembur paling banyak 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu;
- c. Pada hari libur kerja, tarif uang lembur 200% dari tarif lembur hari kerja.-

Catatan :

Pegawai non PNS adalah pegawai yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati sebagai pegawai kontrak/honorar daerah;

17. SATUAN BIAYA UANG TRANSPORT KEGIATA DALAM KOTA MAROS

Uang transport **dapat** diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan masih dalam batas wilayah suatu kota/kabupaten atau maksimal 5 (lima) kilometer dari batas kota/kabupaten.

Untuk pegawai negeri, satuan biaya dapat diberikan sepanjang :

- Tidak menggunakan kendaraan dinas;
- Disertai surat tugas;
- Tidak bersifat rutin;

Catatan :

Maksimal 5 (lima) kilometer dari batas kota Maros adalah sebagai berikut :

- Sebelah **Utara Kota Maros** adalah **Jembatan Pute**;
- Sebelah **Timur Kota Maros** adalah **Kantor Camat Bantimurung**;
- Sebelah **Selatan Kota Maros** adalah **Bandara Lama**;

18. SATUAN BIAYA KEPELUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN

Satuan biaya untuk membiayai keperluan sehari-hari perkantoran serupa barang dan jasa yang habis pakai yang secara langsung menunjang kegiatan dan untuk memenuhi kegiatan dan memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan, terdiri dari **alat tulis, barang cetak, alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, dan air minum pegawai.**

Satuan kerja yang memiliki sampai dengan 40 (empat puluh) pegawai, dapat mengalokasikan paling banyak Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) per tahun. Sementara satuan kerja yang memiliki lebih dari 40 (empat puluh) pegawai, dapat mengalokasikan sesuai indeks dikalikan dengan jumlah pegawai.

19. SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL

Biaya diklat penjenjangan untuk pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya **belum termasuk** biaya perjalanan dinas peserta namun **sudah termasuk** biaya observasi lapangan lapangan. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tariff biaya diklat pimpinan, satuan biaya dapat mengacu pada peraturan pemerintah yang mengatur tentang tarif diklat pimpinan tersebut.

20. SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN

Biaya diklat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagai syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Satuan biaya **belum termasuk** biaya perjalanan dinas peserta namun **sudah termasuk** biaya observasi lapangan lapangan. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat pimpinan, satuan biaya dapat mengacu pada peraturan pemerintah yang mengatur tentang tarif diklat pimpinan tersebut.

21. SATUAN BIAYA DIKLAT TEKHNIS/FUNGSIONAL PNS

Biaya diklat bagi pegawai negeri yang mengikuti diklat teknis atau diklat fungsional. Satuan biaya ini digunakan oleh satuan kerja yang akan melaksanakan diklat teknis/fungsional dimaksud. Satuan biaya diklat ini sudah termasuk biaya akomodasi peserta, pendaftaran peserta dan sertifikasi peserta.

22. SATUAN BIAYA DIKLAT UNTUK MASYARAKAT (non institusional)

Biaya diklat bagi masyarakat yang mengikuti diklat. Satuan biaya ini digunakan oleh satuan kerja yang akan melaksanakan diklat dimaksud.

Satuan biaya diklat ini sudah termasuk biaya akomodasi peserta, pendaftaran peserta dan sertifikasi peserta.

- 23. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT**
Satuan biaya konsumsi digunakan untuk pengadaan makanan termasuk minuman dan kudapan untuk rapat/pertemuan yang diselenggarakan di kantor.
- 24. SATUAN BIAYA PENGADAAN MAKANAN PASIEN**
Satuan biaya untuk pengadaan bahan makanan diberikan kepada pasien yang berada pada rumah sakit, dan puskesmas.
- 25. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG**
Satuan biaya digunakan untuk pemeliharaan rutin dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen).
- 26. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN UNTUK PERWAKILAN/WISMA/MESS PEMDA**
Satuan biaya digunakan untuk pemeliharaan rutin dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor perwakilan/wisma/mess pemda yang berlokasi di Jakarta agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen).
- 27. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL SARANA KANTOR**
Satuan biaya pemeliharaan dan operasional sarana kantor digunakan untuk mempertahankan barang inventaris/peralatan dan mesin serta kendaraan agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).
Satuan biaya untuk kendaraan dinas sudah termasuk biaya bahan bakar minyak dan perpanjangan STNK.
- 28. SATUAN BIAYA PAKAIAN**
Satuan biaya pakaian dinas/kerja resmi pegawai yaitu satuan biaya pengadaan pakaian dinas yang diberikan kepada pegawai negeri yang bekerja pada satuan kerja tertentu dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun;
Satuan biaya pakaian dinas dokter/perawat diperuntukkan bagi dokter/perawat dan penyediaannya secara selektif. Pakaian dinas dapat diberikan berupa 1 (satu) potong jas untuk dokter atau satu stel pakaian untuk perawat per tahun;
Satuan biaya pakaian sopir/pesuruh diperuntukkan bagi sopir/pesuruh yang diangkat berdasarkan surat keputusan Bupati. Pakaian sopir/pesuruh dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun;
Pakaian satpam sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggan, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos security dan atribut lainnya). Pakaian satpam dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.
Satuan biaya tersebut sudah termasuk ongkos jahit.
- 29. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN**
Satuan biaya diperuntukkan bagi pengadaan kendaraan operasional dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi satuan kerja/instansi. Dalam melakukan pengadaan kendaraan operasional harus memperhatikan prinsip-prinsip, antara lain tidak mewah, hemat, sesuai dengan kebutuhan, efisien dan efektif.
Untuk daerah terpencil satuan biaya belum termasuk ongkos kirim.
- 30. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN**
Satuan biaya untuk sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar minyak dan pengemudi, sementara itu satuan biaya sewa mesin foto copy sudah termasuk toner dan biaya perawatan.
- 31. SATUAN BIAYA SEWA RUANG RAPAT/PERTEMUAN**
Sewa ruang rapat/pertemuan digunakan untuk rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai dan kegiatan lain sejenis yang dilaksanakan di luar kantor.
Satuan biaya tersebut sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system, dan fasilitas ruang pertemuan lainnya.

32. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

- a. Uang harian dapat digunakan sebagai uang makan, uang saku, dan transpor lokal;
- b. Selama melakukan perjalanan dinas, Bupati, Wakil Bupati diberikan uang representasi per hari masing-masing sebesar Rp.150.000, serta Pejabat Eselon II sebesar Rp.100.000,- per hari.
- c. Bupati, Wakil Bupati, diberikan fasilitas angkutan dalam kota/sewa kendaraan (termasuk sopir/BBM) sesuai peruntukannya yang diberikan secara **at cost**.

33. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

- a. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas di luar daerah digunakan untuk pengalokasian dana dalam perencanaan anggaran (RKA). Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya penginapan menggunakan metode **at cost** (sesuai pengeluaran).
- b. Peruntukan hotel berbintang
 - **Hotel bintang empat**, diperuntukkan bagi Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah;
 - **Hotel bintang tiga**, diperuntukkan bagi Pejabat Eselon II.b dan Pejabat Eselon III;
 - **Hotel bintang dua**, diperuntukkan bagi Pejabat Eselon IV dan pejabat fungsional;
 - **Hotel bintang satu**, diperuntukkan bagi pegawai negeri (staf);
- c. Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat/pegawai dapat menggunakan penginapan/hotel yang sama dengan kelas kamar penginapan/hotel sesuai dengan yang telah ditetapkan untuk setiap pejabat/pegawai.

34. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERGI – PULANG PERJALANAN DINAS

Satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk **airport tax** serta biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas di luar daerah menggunakan metode **at cost** (sesuai pengeluaran).

Catatan :

- Untuk Bupati dan Wakil Bupati menggunakan kelas **bisnis** dan Pejabat Eselon II kebawah menggunakan kelas **ekonomi**.
- Biaya tiket pesawat disesuaikan dengan harga yang berlaku pada saat keberangkatan.

35. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS

Satuan biaya taksi merupakan tarif satu kali perjalanan dari tempat kedudukan menuju bandara keberangkatan atau dari bandara kedatangan menuju tempat tujuan dikota bandara kedatangan dan sebaliknya.

Contoh perhitungan alokasi biaya taksi :

Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kabupaten Maros ke Jakarta, maka alokasi biaya taksi adalah sebagai berikut :

- a. Berangkat :
 - Biaya taksi dari tempat kedudukan (Kabupaten Maros) ke Bandara Sultan Hasanuddin;
 - Biaya taksi dari Bandara Soekarno-Hatta Jakarta ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Jakarta;
- b. Kembali :
 - Biaya taksi dari (hotel/penginapan/kantor) di Jakarta ke Bandara Soekarno-Hatta Jakarta;
 - Biaya taksi dari Bandara Sultan Hasanuddin ke tempat kedudukan (Kabupaten Maros);

CATATAN UMUM :

1. Satuan biaya Diklat Pimpinan dan Diklat Prajabatan mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

2. Pengerian istilah :

- OJ = Orang/Jam
 - OH = Orang/Hari
 - OB = Orang/Bulan
 - OT = Orang/Tahun
 - OP = Orang/Paket
 - OK = Orang/Kegiatan
 - OR = Orang/Responden
 - Oter = Orang/Terbit
-

h

NO.	PROPINSI	TARIF TAKSI	KET
1	2	3	9
1	NANGROE ACEH DARUSSALAM	Rp 90,000	
2	SUMATERA UTARA	Rp 70,000	
3	RIAU	Rp 60,000	
4	KEPULAUAN RIAU	Rp 90,000	
5	JAMBI	Rp 60,000	
6	SUMATERA BARAT	Rp 120,000	
7	SUMATERA SELATAN	Rp 90,000	
8	LAMPUNG	Rp 100,000	
9	BENGKULU	Rp 80,000	
10	BANGKA BELITUNG	Rp 60,000	
11	BANTEN	Rp 260,000	
12	JAWA BARAT	Rp 60,000	
13	D.K.I JAKARTA	Rp 160,000	
14	JAWA TENGAH	Rp 50,000	
15	D.I. YOGYAKARTA	Rp 60,000	
16	JAWA TIMUR	Rp 120,000	
17	BALI	Rp 100,000	
18	NUSA TENGGARA BARAT	Rp 30,000	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Rp 70,000	
20	KALIMANTAN BARAT	Rp 90,000	
21	KALIMANTAN TENGAH	Rp 70,000	
22	KALIMANTAN SELATAN	Rp 90,000	
23	KALIMANTAN TIMUR	Rp 280,000	
24	SULAWESI UTARA	Rp 110,000	
25	GORONGTALO	Rp 80,000	
26	SULAWESI BARAT	Rp 125,000	
27	SULAWESI SELATAN	Rp 110,000	
28	SULAWESI TENGAH	Rp 40,000	
29	SULAWESI TENGGARA	Rp 90,000	
30	MALUKU	Rp 170,000	
31	MALUKU UTARA	Rp 110,000	
32	PAPUA	Rp 260,000	
33	IRIAN JAYA BARAT	Rp 110,000	

BUPATI MAROS,




 H. M. HATTA RAHMAN

PARAF	
Asisten	: <u>019</u>
Kadis	: <u>[Signature]</u>
Sekretaris	: <u>[Signature]</u>
Kabid	: <u>[Signature]</u>
Wakil/Kasubag	: <u>[Signature]</u>